

Implementasi Pancasila Sebagai Salah Satu Bentuk Bela Negara

Devi Asriani ^{a,1*}, Dinie Anggraeni Dewi ^{a,2}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ deviasriani@upi.edu *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 4 Januari 2022;

Revised: 20 Januari 2022;

Accepted: 28 Januari 2022.

Kata-kata kunci:

Implementasi;
Pancasila;
Bela Negara.

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya implementasi Pancasila dalam kehidupan sebagai bentuk bela Negara. Setiap butir Pancasila memiliki makna yang mendalam dimana setiap sila wajib di implementasikan oleh setiap warga negara Indonesia. penelitian ini dikaji menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana sumber pembahasan ini didapatkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber. Setelah dianalisis, diperoleh bahwa implementasi Pancasila merupakan salah satu bentuk dari bela negara yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Indonesia memiliki ras, suku, agama, dan bahasa yang beragam. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, maka warga negara Indonesia akan memiliki rasa simpati yang tinggi, dimana kita semua bisa saling menghargai satu sama lain sesama bangsa Indonesia serta tidak dibatasi oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Implementasi Pancasila dalam kehidupan juga diharapkan mampu menanamkan rasa cinta tanah air dalam diri warga negara Indonesia. Dengan begitu warga negara Indonesia sama dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keywords:

Implementation;
Pancasila;
State Defense.

ABSTRACT

The Implementation of Pancasila as a Form of State Defense. The article aims to explain the importance of implementing Pancasila in life as a Form of State Defense. Every point of Pancasila has a deep meaning where every precept must be implemented by every Indonesian citizen. This research is studied using a descriptive qualitative method where the source of this discussion is obtained through literature study from various sources. After being analyzed, it was found that the implementation of Pancasila is a form of state defense that must be carried out by every Indonesian citizen. Indonesia has a variety of races, ethnicities, religions and languages. By implementing Pancasila values, Indonesian citizens will have a high sense of sympathy, where we can all respect each other and our fellow Indonesians are not limited by existing differences. The implementation of Pancasila in life is also expected to be able to instill a sense of love for the motherland in Indonesian citizens. That way Indonesian citizens are the same as continuing the struggle of the heroes in defending the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Copyright © 2022 (Devi Asriani & Dini Anggraeni Dewi). All Right Reserved

How to Cite: Asriani, D., & Dewi, D. A. (2022). Implementasi Pancasila Sebagai Salah Satu Bentuk Bela Negara. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 2(1), 8–14.
<https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i7.241>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pancasila berasal dari kata panca (lima) dan sila (sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang baik) (Hariati, 2019). Menurut Aminullah, Pancasila adalah dasar kehormatan Indonesia, yaitu sebagai dasar negara, ini karena Pancasila telah tertanam dalam hati Bangsa Indonesia dan dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Pancasila berperan dalam mengatur sikap dan tingkah laku rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Umra (2019) bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku yang dijiwai rasa cinta kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang rela berkorban demi kelangsungan hidup negara. Maka dari itu Pancasila harus ditegakkan secara tepat sebagai dasar negara dan selalu diimplementasikan dalam kehidupan. Implementasi Pancasila harus datang dan timbul dari masyarakat itu sendiri, artinya Pancasila memang dibutuhkan sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara (Soeprapto, 2010).

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini hendak menyatakan bahwa ada keyakinan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan bela negara mensyaratkan adanya kemampuan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dari warga negara. Kemampuan tersebut bisa dibentuk melalui pendidikan bela negara melalui jalur pendidikan formal, non formal maupun informal. Jalur pendidikan formal di sekolah diberi Pendidikan Kewarganegaraan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi (Widodo, 2011).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini berdasar pada studi kepustakaan untuk mengkaji pentingnya implementasi Pancasila sebagai bentuk dari bela negara. Dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan, warga negara Indonesia akan memiliki rasa simpati yang tinggi untuk saling menghargai satu sama lain tanpa dibatasi oleh perbedaan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai *human instrument* dengan menetapkan fokus masalah, memilih berbagai informasi sebagai sumber, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan semua itu.

Hasil dan Pembahasan

Para pendahulu kita melalui perjalanan panjang dan serangkaian peristiwa yang penuh dengan perjuangan dalam melakukan upaya bela negara, sudah sepatutnya kita melanjutkan perjuangan para pendahulu kita dengan tetap melaksanakan nilai-nilai bela negara agar keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara dapat tetap terjaga. Salah satu bentuk bela negara yang dapat kita lakukan ialah dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.

Dalam sila pertama hubungan antara manusia dengan Tuhan, sila kedua hubungan sesama manusia, sila ketiga hubungan antara manusia dengan tanah air dan bangsa Indonesia, sila keempat hubungan antara rakyat dengan pemerintah, dan sila kelima negara sebagai kesatuan realisasi kesejahteraan (Soeprapto, 2010). Pancasila memberikan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kelima sila yang terdapat pada Pancasila merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila, ekonomi yang diterapkan di Indonesia merupakan ekonomi yang berdasar pada Pancasila, Hak asasi manusia pun berdasarkan pada Pancasila. Demokrasi itu sendiri adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara

langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.

Upaya mengimplementasikan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu dipahami konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk memperkokoh kesadaran dan keyakinan akan kebutuhan terhadap Pancasila sebagai tali persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta pedoman hidup rakyat Indonesia dalam berperilaku, maka perlu untuk memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Aktualisasi nilai Pancasila harus mulai disosialisasikan dari berbagai lingkungan pendidikan. Baik itu di keluarga sebagai pendidikan informal, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, maupun dalam masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal (Alaby, 2019).

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila tersebut yang harus kita implementasikan baik untuk pemerintah maupun rakyat sama-sama sebagai warga negara Indonesia adalah sebagai berikut, pertama Ketuhanan Yang Maha Esa (Gultom, 2016). Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, yaitu percaya akan adanya Tuhan. telah kita ketahui bahwa adanya kepercayaan pada Tuhan sudah terlihat sejak zaman nenek moyang, yaitu sejak masa dinamisme dan animisme, lalu menjadi politeisme, monoteisme dan terdapat peninggalan-peninggalan yang dapat kita lihat seperti tempat-tempat pemujaan dan peribadatan upacara ritual keagamaan.

Atikarini (2018) menjelaskan bahwa dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat pengertian dan keyakinan bahwa alam semesta beserta makhluk dan isinya merupakan ciptaan Tuhan, dan Tuhanlah yang telah mengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya. Selain itu, Tuhan juga-lah yang telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memelihara kelangsungan hidup ciptaan-Nya. Eksistensi segala hal yang ada di alam semesta ini memiliki fungsinya masing-masing sesuai yang telah digariskan oleh Tuhan. Ada keyakinan bahwa segala yang unsur yang terdapat di alam semesta ini saling bergantung sehingga membentuk ekosistem. Masing-masing memiliki peran dan kedudukannya dalam menjaga kelestarian alam dan pengingkaran fungsi tersebut akan mengganggu keseimbangannya.

Ketuhanan Yang Maha Esa bermaksud bahwa manusia harus sadar dan yakin bahwa dirinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan dan harus tunduk dan patuh pada perintah-perintah-Nya serta manusia tidak diperbolehkan bertindak sesuai kehendaknya sendiri dengan mengingkari apa yang sudah menjadi perintah Tuhan. Tindakan yang mengarah pada kerusakan dan kehancuran, merupakan hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Selain itu, relasi antar manusia harus selalu mengusahakan dialog transformatif agar terjadi dalam keadaan yang aman dan kondusif (Gultom, 2010).

Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab didasarkan sejak dulu bahwa bangsa Indonesia yakin bahwa manusia dilahirkan dengan cara yang sama. Bangsa Indonesia tidak menyukai perbedaan martabat hanya karena perbedaan warna kulit, keturunan, kasta, suku, ras maupun hal lainnya. Sebagai bangsa Indonesia kita harus bersikap dengan adil terhadap sesama manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tinggi derajatnya. Manusia dibekali akal untuk membedakan yang benar dan yang salah. Manusia selalu berusaha melakukan yang terbaik agar mendapat perlakuan yang adil. Untuk mencapai hal itu, manusia berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Manusia harus menghargai kesetaraan dan perbedaan, baik itu pria maupun wanita, kaya ataupun miskin. Menurut Aristin (2016) nilai kemanusiaan yang adil berarti hakekat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Kemanusiaan merupakan wujud dan kehadiran dari reaksi-reaksi antar masyarakat yang memandang satu sama lain sebagai sesamanya yang layak dan harus dihormati.

Persatuan Indonesia dimengerti dalam konteks letak geografis Indonesia yang memisahkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya menjadikan Indonesia mempunyai banyak perbedaan yang beraneka ragam dimalai bahasa daerah, suku bangsa, adat istiadat, kesenian, dan kebudayaan namun bangsa Indonesia memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Menurut Hanafi, (2018) Persatuan Indonesia adalah satu untuk Indonesia walaupun keadaan di masyarakat sangat penuh perbedaan tetapi harus menjadi satu darah Indonesia dan rela mengorbankan kepentingan golongan demi negara Indonesia Indonesia memiliki dasar negara Pancasila. Ketika mendengar kata Pancasila, maka hal yang akan terbayang dalam pikiran kita adalah *Bhineka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia memiliki sekitar 714 suku dan sekitar 652 bahasa daerah yang berbeda hal ini mengharuskan kita untuk saling bertoleransi satu sama lain dan menjadikan perbedaan sebagai perbedaan yang menyatukan dan tidak menjadikannya sebagai alasan untuk berpecah belah. Setiap ada ancaman dari luar akan selalu menimbulkan kesadaran bahwa dalam perbedaan itu terdapat ketunggalan yang harus diutamakan kesadaran kebangsaan yang berbeda yaitu sebagai bangsa Indonesia.

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan bermaksud menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah sistem pemerintahan dimana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Demokrasi memiliki ciri kebebasan, dimana rakyat bebas dalam menentukan pemimpin negara, Khoiriah, I (2019). Frase “dipimpin oleh hikmat” artinya bahwa Negara Indonesia harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, cerdas, dan tahu bagaimana cara memimpin rakyat Indonesia yang baik dan benar.

Pelaksanaan sila keempat ini memiliki nilai penting yaitu diantaranya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak sendiri kepada, selalu bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah dengan tujuan mencapai mufakat diikuti dengan semangat kekeluargaan, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang, melakukan musyawarah dengan akal sehat dan nurani, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Ciri khas kepribadian bangsa dari berbagai suku, bangsa Indonesia yaitu adanya musyawarah di antara warganya dalam mengatur tata kehidupan mereka. Kepala desa, kepala suku, dan sebagainya hanya sebagai pembimbing yang dipilih secara musyawarah.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan yang adil. Menurut Haryanto, T. (2018) Keadilan merupakan hak yang dimiliki semua orang dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak yang dimilikinya. Keadilan memiliki makna keseimbangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keseimbangan yang dimaksud yaitu, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya atau dapat mengandung makna persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu prinsip persatuan dan kesatuan. Sila ini memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan budaya sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Pada sila kelima Pancasila ini dapat diimplementasikan dengan melakukan perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong-royong, bersikap adil terhadap siapapun dan tidak diskriminatif terhadap suatu suku, ras, atau siapapun, mengimbangi antara kewajiban dan hak agar terciptanya kehidupan rukun dan damai, menghormati hak orang lain serta tidak berusaha untuk mengambil atau menghalangi hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersikap boros dalam hal apapun, tidak melakukan hal yang akan merugikan kepentingan umum, bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pancasila disebut sebagai landasan ideal yang cita-citanya harus dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia. Namun dewasa ini sulit untuk membuktikan bahwa Pancasila masih menjiwai dalam diri

bangsa Indonesia. Saat ini, Pancasila terasaseperti hanya menjadi formalitas. Buktinya adalah tidak aplikatifnya sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejak negara ini berdiri, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbukti mampu mengayomi berbagai macam perbedaan yang ada dalam masyarakat (Damayanti (2017). Namun, aksi intoleransi yang marak terjadi setelah Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan. Hal ini menunjukkan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk mempertahankan Pancasila baik kini maupun nanti, beberapa diantaranya telah tampak di permukaan (Suryati, 2014).

Pancasila selalu bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta mampu menyesuaikan dengan zaman dan tidak bersifat tertutup dan kaku. Walaupun begitu, Pancasila tidak akan bisa digantikan dengan dasar-dasar yang lainnya. Contoh kasus pada sila pertama yang pernah terjadi ialah saat mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok yang mengutip salah satu ayat Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingan politik yang memicu permasalahan pada unsur SARA (Pratama, 2018). Perilaku yang dilakukan saat itu memicu perpecahan pada rakyat Indonesia. Hal itu tentu bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana maksud dari sila tersebut ialah setiap orang berhak memeluk agamanya tanpa paksaan, tidak diperbolehkannya menistaan agama manapun, serta menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. Lalu sila lain yang dilanggar adalah sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dimana semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam kesejahteraan, kehidupan yang layak, persamaan hak dalam politik, kesetaraan dalam hukum, dan hal-hal lainnya.

Contoh pelanggaran sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia adalah kasus terorisme tindakan makar yang dilakukan sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama ataupun suatu hal tertentu yang bertujuan untuk memisahkan wilayah Negara Indonesia. Selain itu contoh lainnya adalah tawuran antar pelajar dan perilaku saling menghujat dan membuli satu sama lain. Lalu pada sila keempat, Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan contoh pelanggarannya yaitu banyaknya sengketa pilkada yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kurang memiliki pendewasaan politik.

Pada sila kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang berarti bahwa setiap warga Indonesia harus hidup dengan adil, makmur, dan saling menghormati satu sama lain. Tetapi saat ini masih sering terjadi pelanggaran dari sila tersebut contohnya seperti kemiskinan, diskriminatif, dan perlakuan yang tidak adil karena hal tertentu. Hal yang biasa kita lihat contohnya di rumah sakit, pasien yang kurang mampu biasanya diperlakukan tidak adil dan tanpa rasa hormat dibandingkan dengan pasien yang mampu yang seringkali diistimewakan.

Sebagai Bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun rakyat bersama-sama harus bisa mengimplementasikan sila-sila Pancasila dalam kehidupan ini agar nilai-nilai Pancasila itu sendiri tidak luntur dan tergantikan. Presiden pertama Indonesia yaitu Bung Karno pernah berkata bahwa jika kita tidak mengimplementasikan Pancasila maka bangsa ini akan hancur. Apabila bangsa Indonesia ini melupakan Pancasila, tidak melangsungkan dan bahkan mengamalkan maka bangsa ini akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu manusia Indonesia harus mengimplementasikan seluruh nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan mengetahui Pancasila sebagai dasar negara yaitu meyakini bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan tata tertib hukum Indonesia. Kita seharusnya benar-benar bisa mengamalkan dan tidak hanya menjadikannya sebagai simbol agar rasa dan kesatuan kita semakin kuat dan tidak akan pernah bisa dipecah belah (Yasmin, 2020). Jika bangsa Indonesia mampu memahami nilai-nilai Pancasila dan bisa mengimplementasikannya maka tidak akan terjadi kasus-kasus yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila seperti yang disebutkan tadi karena Pancasila sendiri merupakan pemersatu bangsa Indonesia.

Kunci dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan adalah dengan adanya integrasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan, seperti sistem pendidikan, sistem politik, pertahanan keamanan, sistem ekonomi, dan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.

Dengan terintegrasinya Pancasila, maka transformasi menuju bangsa yang makmur, sejahtera, dan Bhineka Tunggal Ika akan lebih cepat terwujud dalam kesatuan wilayah Indonesia.

Simpulan

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang selalu tercantum dalam pembukaan UUD yang berlaku di Indonesia. Pancasila memiliki sila-sila yang wajib diimplementasikan oleh bangsa Indonesia sebagai bentuk bela negara. Dasar implementasi itu adalah pemahaman bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha esa. Bentuk implementasi bela negara bisa dilakukan dengan ikut aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum. Selain itu, Bela negara dengan demikian dimengerti sebagai bentuk hubungan manusia dengan manusia lain, untuk mewujudkan persatuan bangsa. Tujuannya adalah terwujudnya keadilan sosial.

Referensi

- Alaby, M. A. (2019). Membumikan Nilai Pancasila pada Generasi Bangsa. *Gema Wiralodra*, 10(2), 179-190.
- Aminullah, A. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 3(1), 620-628.
- Aristin, R. (2016). Aktualisasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Era Reformasi. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1(1), 27-36.
- Atikarini, D. (2018). Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila Yang Terjadi Di Indonesia. Retrieved March 16, 2021, from: [Osf.io/Preprints/Inarxiv/R6xc2/](https://osf.io/preprints/inarxiv/R6xc2/)
- Damayanti, A. (2017). Pancasila Dalam Menjaga Keutuhan NKRI dari Aksi Intoleransi di Indonesia.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Hanafi. (2018). Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewargaegaraan*, 3 (1), 58. Retrieved from [Http://Journal2.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk/Article/View/6041/3097](http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/6041/3097)
- Hariati, D., dkk. (2019). Mengenal Sila Dan Simbol Dalam Sila Sila Pancasila. Retrieved march 16, 2021 from <https://osf.io/preprints/inarxiv/yxqgv/>
- Haryanto, T. (2018). Implementasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di SMP Tumbuh Yogyakarta). (Unpublished master's Thesis) Repository Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.
- Karo, R. (Tanpa Tahun). Pancasila Sebagai Cita Hukum Dengan Kaitan Sistem Hukum Nasional. Retrieved March 20, 2021 from: [academia.Edu/Download/50798291/Tugas_Polhum_Rizky.Pdf](https://academia.edu/download/50798291/Tugas_Polhum_Rizky.Pdf)
- Khoiriah, I. (2019). Memahami Nilai Nilai Pancasila Dan Penerapannya. Retrieved March 17, 2021 from [Https://Osf.Io/Preprints/Inarxiv/8su7a/](https://osf.io/preprints/inarxiv/8su7a/)
- Pratama, A. Y. (2018). Pengaruh Kegiatan Pramuka Terhadap Kedisiplinan Peserta Didik: Studi Kasus di SMA Negeri 2 Tasikmalaya JL. RE Martadinata No. 261, Panyingkiran, Indihiang, Tasikmalaya, Jawa Barat (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Soeprapto, S. (2016). Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 10(2), 17-28.
- Suryati, L. (2014). Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5 (1), 37.

- Umra, S. I. (2019). Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara. *Lex Renaissance*, 4(1), 164-178.
- Yasmin, P. (2020). Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ketahui Kedudukan, Makna, Dan Fungsinya. Retrieved march 20, 2021, from: <https://News.Detik.Com/Berita/D-5304134/Pancasila-Sebagai-Dasar-Negara-Ketahui-Kedudukan-Makna-Dan-Fungsinya>
- Widodo, S. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. *CIVIS*, 1(1/Januari).